



Kantor Bupati Bocor Akhirnya Direhab

TABANAN, NusaBali

Setelah bocor di mana-mana, gedung Sekretariat Daerah (Setda) Kantor Bupati Tabanan mulai direhab. Rehab gedung yang dibangun tahun 1991 itu akan rampung pada Desember 2018 dengan nilai kontrak Rp 1,899 miliar.

Pantauan di lapangan sejumlah pekerja sudah mulai membongkar plafon gedung sisi timur. Tangga darurat untuk membantu membongkar sudah terpasang.

Dan sesuai kontrak, rehab gedung hanya akan memperbaiki bagian atap saja, tidak membongkar keseluruhan karena kondisi fisik gedung masih bagus. Rehab gedung tersebut juga meliputi pembenahan ruang rapat Wakil Bupati Tabanan, dan kanopi di bagian depan gedung dinaikkan.

Kepala Bidang Bangunan dan Gedung Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PUPR PKP) Tabanan Kadek Faridatini Sueca, menjelaskan rehab gedung setda Tabanan

dimenangkan oleh CV Nitra Sakti dengan nilai kontrak Rp 1,899 miliar dari pagu Rp 2 miliar. Sesuai dengan surat perintah mulai kerja (SPMK) 9 Juli 2018 dan berakhir 5 Desember 2018. "Waktu pengerjaan 150 hari kalender," ungkap Faridatini, Senin (16/7).

Kata dia, rehab gedung hanya membongkar pada bagian atap saja. Rinciannya, genteng diganti dengan metal berpasir, plafon diganti. Sekat-sekat kantor ditata, dan pengecatan seluruh ruangan.

Menurutnya, rehab gedung dilakukan bertahap dari sisi timur kemudian baru pembenahan ke arah barat. Di bagian timur tersebut ada ruangan Bagian Hukum dan HAM, Bagian Organisasi Tata Laksana (Ortal), dan Bagian Kesra.

Setelah selesai rehab di sisi timur baru ke sisi barat, di antaranya Bagian Ekonomi, Tata Pemerintahan dan Pembangunan. "Ini kami lakukan agar birokrasi bisa berjalan, di samping kekurangan tempat untuk pindah supaya bergantian biar efektif," tegas Faridatini.  d



• NUSABALI/DESAK

GEDUNG sekretariat daerah Kabupaten Tabanan yang bocor mulai dibongkar, Senin (16/7).

Edisi : Selasa, 17 Juli 2018

Hal : 7



Rapat Paripurna DPRD Jembrana Fraksi Tekankan Evaluasi Realisasi Belanja Daerah

NEGARA, NusaBali

Rapat Paripurna II DPRD Jembrana masa persidangan III tahun 2017/2018, dengan agenda pandangan umum fraksi terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Jembrana tahun anggaran (TA) 2017, digelar di ruang sidang DPRD Jembrana, Senin (16/7). Dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPRD Jembrana I Wayan Wardana, itu sejumlah fraksi menekankan kepada eksekutif untuk mengevaluasi rendahnya realisasi belanja daerah TA 2017.

Sorotan terhadap realisasi belanja daerah yang mencapai 81,86 persen pada tahun anggaran 2017 itu, juga sempat disinggung dalam pandangan umum Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Ni Putu Lilyana. Meski memberikan catatan terhadap belanja daerah, Fraksi PDIP tetap mengapresiasi capaian opini Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) atas pemeriksaan laporan keuangan Pemkab Jembrana tahun 2017 yang mendapat predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Terlebih predikat WTP itu merupakan keempat kali yang diraih secara berturut-turut.

"Ini artinya penyelenggaraan pemerintahan daerah telah memenuhi dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas capaian tersebut, kami mengucapkan selamat, dan ke depan agar tetap dipertahankan dan disempurnakan," pesannya.

Sementara beberapa fraksi lainnya juga memberikan sejumlah masukan untuk perbaikan yang perlu dilakukan eksekutif. Seperti dari Fraksi Demokrat Sejahtera (Demokrat dan PKS) yang dibacakan Haryono. Fraksi Demokrat Sejahtera mendorong Pemkab Jembrana pada penerimaan peserta didik baru, khususnya melalui jalur zonasi, agar murni diterapkan berdasarkan jarak antara sekolah dengan domisili peserta didik, dan tidak diranking berdasarkan nilai ujian nasional (NUN).

Sementara dari Fraksi Gerindra yang dibacakan oleh I Ketut Sadwi Darmawan, berpandangan dari anggaran yang terealisasi di bawah 100 persen, agar bisa dimanfaatkan untuk menambah jumlah guru SD maupun SMP yang masih kurang. "Selain menambah jumlah guru, kami harapkan anggaran tersebut bisa dimanfaatkan

untuk memperbaiki kesejahteraan guru non PNS daerah," harap Sadwi.

Pandangan umum Fraksi Golkar yang dibacakan oleh I Ketut Widastra, meminta Pemkab Jembrana untuk terus meningkatkan sumber pendapatan asli daerah (PAD) di Jembrana dari berbagai sektor, khususnya sektor pariwisata. Kemudian dari Fraksi Hanura yang dibacakan oleh Ferlinand Taufik, mendorong Pemkab Jembrana selalu mendukung produktivitas petani. Di bidang ekonomi, Fraksi Hanura juga berharap dapat terus mengoptimalkan kebangkitan kelompok masyarakat (pokmas), termasuk memberikan tempat dan ruang untuk market dan pembinaan.

Dari Fraksi Kebangkitan Nasional yang dibacakan H Yunus, berpandangan dari sisi pelaksanaan realisasi program, meminta pembangunan infrastruktur yang telah dilakukan, khususnya perbaikan ataupun pembangunan jalan desa serta perbaikan gang yang ada di pemukiman warga supaya dilanjutkan, dan pembangunannya dilakukan secara adil dan merata. **ode**

Edisi : Selasa, 17 Juli 2018

Hal : 7



Pembangunan Dermaga DTW Teluk Gilimanuk Start Molor, Dikhawatiri Hasilnya Kurang Maksimal

NEGARA, NusaBali

Proyek pembangunan dermaga pariwisata di kawasan Daerah Tujuan Wisata (DTW) Teluk Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Jembrana, belakangan menjadi sorotan. Pasalnya, proyek pembangunan dermaga pariwisata yang harusnya sudah mulai digarap sesuai kontrak pada akhir Juni 2018, diketahui baru mulai dikerjakan memasuki pekan kedua Juli 2018. Start proyek yang molor selama dua pekan itu dikhawatiri berpengaruh terhadap hasil pembangunan yang kurang maksimal.

Berdasar pemantauan, Senin (16/7), sejumlah pekerja tampak sibuk mengerjakan pembangunan dermaga pariwisata sebagai pengganti dermaga kayu yang usang di kawasan DTW tersebut. Sesuai papan informasi proyek, pembangunan dermaga pariwisata dengan nilai Rp 645 juta dari dana alokasi khusus (DAK) di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jembrana, sesuai kontrak per 29 Juni 2018 itu, digarap CV Cahaya Dewata dengan waktu pelaksanaan selama 120 hari. Namun sayangnya, meski jelas tercantum kontrak mulai akhir Juni lalu, sejumlah pekerja di lokasi mengaku, baru mulai bekerja sepekan lalu. "Mulai kerja seminggu lalu, sesuai perintah bos," ujar salah seorang pekerja di proyek tersebut.

Seorang warga menyesalkan start proyek yang molor. Menurutnya, jika pengerjaan terlalu dikebut karena start yang molor, dikhawatirkan berdampak terhadap hasil. Apalagi, pembangunan dermaga pariwisata di tepi perairan Teluk Gilimanuk itu, juga perlu menyesuaikan dengan kondisi pasang surut arus yang kerap terjadi di perairan setempat.

"Kami tetap harapkan yang terbaik. Mudah-mudahan saja bagus hasilnya. Biar tidak dermaga baru, malah duluan rusak dibanding dermaga kayu yang hendak diganti. Karena dermaga kayu yang sebelumnya, wajar sudah rusak karena dibangun sudah sejak zaman Bupati Winasa," ujar pelaku pariwisata di Teluk Gilimanuk, yang enggan dikorbankan namanya.

Sementara Direktur CV Cahaya Dewata Made Wardani, mengakui pengerjaan proyek dermaga pariwisata itu baru dimulai sepekan lalu. Terkait kekhawatiran terhadap kualitas yang kurang maksimal lantaran start proyek yang molor itu, dipastikan tidak akan terjadi. Dia yakin pengerjaan akan berjalan lancar sesuai waktu pelaksanaan, dengan kualitas bagus, karena juga selalu dipantau konsultan pengawas di lokasi proyek. "Jangan khawatir, pekerjaan pasti bagus karena tiap hari selalu diawasi oleh konsultan pengawas," ujarnya. **ode**

Edisi : Selasa, 17 Juli 2018

Hal : 7



Wajah Pasar Banyuasri Dirombak Total

★ Perlu Dana Rp 180 Miliar untuk Jadi Pasar Semi Modern Bisa Menampung 1.722 Pedagang

SINGARAJA, NusaBali

Bangunan fisik Pasar Banyuasri, di Kelurahan Banyuasri, Kecamatan Buleleng, diubah total dalam upaya merevitalisasi pasar terbesar ketiga di Buleleng tersebut. Perubahan bentuk bangunan itu terlihat dari Detail Engineering Design (DED) yang dipaparkan dihadapan Bupati Buleleng, Senin (16/7) di ruang rapat Kantor Bupati, Jalan Pahlawan Singaraja.

Dalam DED terlihat, Pasar Banyuasri dibangun tiga lantai, dengan model semi modern. Terdapat beberapa blok di sisi barat, timur, dan utara yang menjadi satu kesatuan. Nantinya, Pasar Banyuasri mampu menampung 1.700 pedagang, termasuk seluruh pedagang di pasar tumpang yang selama

ini mengambil lahan terminal Banyuasri. Total anggaran yang diperlukan untuk membangun Pasar Banyuasri tiga lagi dengan konsep semi modern, diperkirakan sebesar Rp 180 miliar.

Bupati Buleleng, Putu Agus Suradnyana usai pemaparan DED mengaku, puas melihat potret Pasar Banyuasri kedepannya. Disebutkan, DED itu telah memberikan gambaran pengelompokan jenis dagangan, jumlah pedagang yang bisa ditampung, areal parkir dan sirkulasi udara yang memadai di dalam pasar. "Kita minta untuk lebih mendetailkan apa yang menjadi masukan tadi. Setelah itu, baru kita adakan sosialisasi kepada masyarakat dan juga pedagang

di sana," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan, jika tidak ada penurunan besaran Dana Alokasi Umum (DAU) dari pemerintah pusat, pembangunan akan dimulai tahun

depan

dengan memulai dari membangun struktur bangunan dengan perkiraan biaya mencapai Rp 50 miliar. "Mudah-mudahan tidak ada penurunan

besaran DAU. Tahun depan kita akan mulai dari pembangunan struktur bangunan terlebih dahulu," ujar Agus Suradnyana.

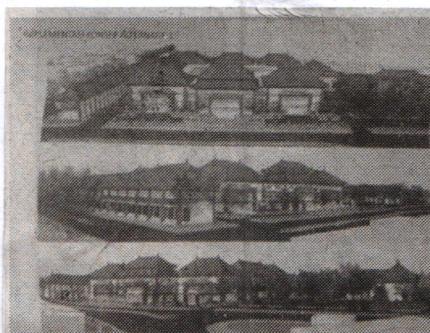
Masalah relokasi? Bupati mengakui masih memikir-

kan lokasi penampungan sementara bagi pedagang selama proses pembangunan. Namun, Bupati menyatakan akan memanfaatkan lahan yang tidak jauh dari lokasi Pasar Banyuasri sebagai tempat penampungan sementara. "Apakah memanfaatkan parkir sebelah terminal atau mengoptimalkan jalan-jalan di sekitar pasar. Hal ini belum disosialisasikan karena masih penyempurnaan DED. Yang jelas tidak ada hak-hak pedagang yang dikurangi atau dipotong," jelasnya.

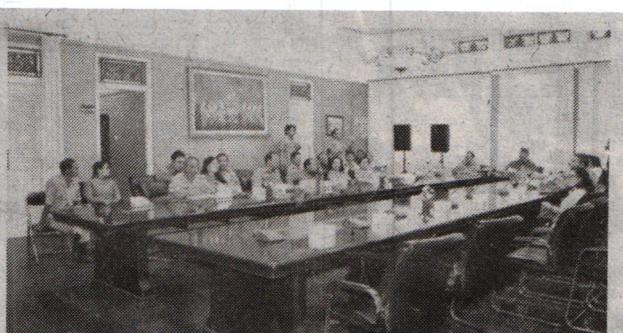
Sementara, Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Buleleng, Ketut Suparto, kembali menegaskan, jumlah pedagang yang bisa ditampung nanti sebanyak

1.772 pedagang. Semua pedagang yang ada bisa tertampung nantinya. "Tidak ada yang dirugikan. Semua bangunan ruko bertingkat. Justru akan diperbaiki dan ditata lebih bagus lagi," katanya.

Dirinya menambahkan pasar ini berbentuk pasar semi modern dengan tiga lantai. Untuk lantai satu diperuntukan sebagai tempat pedagang basah. Lantai dua untuk pedagang kering seperti kain-kain ataupun palen-palen. Sedangkan lantai tiga ada pedagang-pedagang kuliner sekaligus dijadikan parkir kendaraan. "Dengan begitu para pemberli yang memarkirkan kendaraannya akan disuguhi kuliner dulu. Makan dengan view pantai dari lantai tiga," katanya Suparto. **k19**



BENTUK Pasar Banyuasri, yang dibangun dengan konsep semi modern.



PEMAPARAN DED yang dihadiri langsung oleh Bupati Putu Agus Suradnyana.

Edisi : Seksa, 17 Juli 2018
Hal : 4



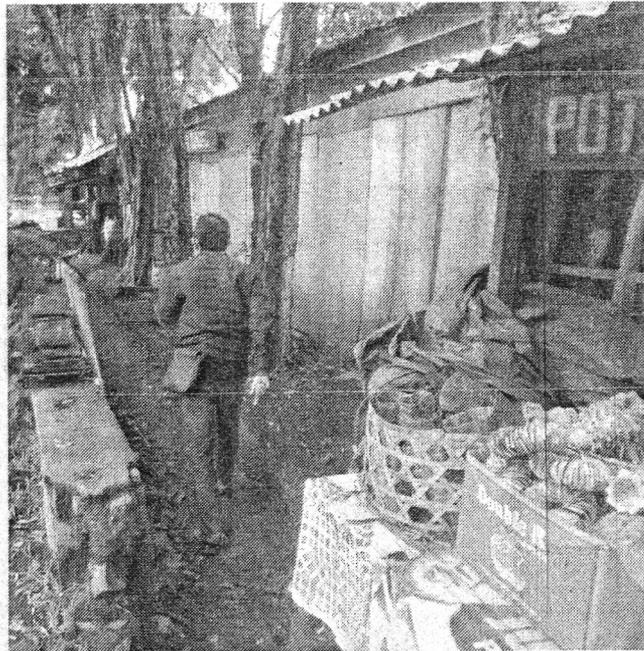
Pembangunan Pasar Lokal Crana Dilanjutkan

BANGLI, NusaBali

Pembangunan Pasar Loka Crana dan Terminal Loka Crana dilanjutkan tahun ini. Pengerjaannya akan dimulai pada akhir bulan Juli ini. Sejumlah pedagang yang menempati bangunan semi permanen di seputaran terminal mulai dipindahkan. Renovasi di Pasar Kidul Bangli juga akan segera dilanjutkan.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Bangli, I Nengah Sudibia, menjelaskan kelanjutan pembangunan Pasar Loka Crana dilakukan secara bertahap. Di tahun 2017 diawali dengan pembangunan struktur induk pasar. Di tahun 2018 pembangunan dilanjutkan meliputi finishing serta penunjang pasar dengan alokasi dana Rp 15 miliar. Setelah melalui proses Unit Layanan Pengadaan (ULP), kelanjutan pembangunan akan digarap PT Nirmala selaku pemenang. "Tinggal tanda tangan kontrak, setelah itu pekerjaan dimulai," ungkapnya, Minggu (14/7).

Ditambahkan, proses kelanjutan Pasar Kidul juga sama.



• NUSABALI/EKA SRI
Bangunan semi permanen yang ditempati para pedagang di Terminal Loka Crana, Bangli, Minggu (15/7).

Pemenangnya PT Batu Karang, tinggal tanda tangan kontrak. Kegiatan meliputi renovasi bangunan stimulus sebelah utara,

perbaikan toilet, penataan area parkir, dan taman. "Telah ditetapkan pemenangnya, maka untuk proses pembangunan

Pasar Loka Crana dan Pasar Kidul sudah bisa dimulai pada akhir bulan Juli ini.

Bagi pedagang yang masih menempati bangunan, buat sementara pedagang berjualan di sebelah barat Pasar Kidul. Nengah Sudibia mengaku sudah berkoordinasi dengan pengelola pasar agar segera menindaklanjuti pemindahan perdagangan tersebut. "Kami sudah sampaikan melalui surat imbauan agar segera ditindaklanjuti," imbuh Nengah Sudibia.

Salah seorang pedagang di seputaran terminal, Ibu Ayu, mengaku sudah menerima surat imbauan untuk pindah dari pengelola pasar tanggal 10 Juli 2018. Pasca menerima surat tersebut, pedagang sudah mulai siap-siap memindahkan dagangannya. Pedagangan di seputaran terminal diarahkan berjualan di barat terminal dekat kantor PLN. "Katanya akan disediakan tempat namun belum jelas juga dimana lokasinya," ujarnya. Meski demikian Ibu Ayu memilih menyewa tempat yang lokasinya tak jauh dari terminal Loka Crana, Bangli. **e**

Edisi : Senin, 16 Juli 2018

Hal : 8



LINTAS

**PDAM Gelontor Rp 5 M
untuk Pengadaan Pipa Mini
dan Biaya Pemasangan**

DENPASAR, NusaBali

PDAM Kota Denpasar menggelontorkan dana Rp 5 miliar untuk pengadaan pipa mini di Kota Denpasar. Hal tersebut dilakukan menyusul seringnya kebocoran pipa penyaluran ke rumah-rumah warga. Ditambah kapasitas air yang semakin besar dari IPA Waribang.

Direktur Utama PDAM Kota Denpasar, IB Gede Arsana saat dikonfirmasi di Denpasar, Minggu (15/7) mengungkapkan, pengadaan tersebut dilakukan untuk menambah kelancaran pelayanan bagi pelanggan rumah tangga. Saat ini pihaknya mengeluarkan anggaran Rp 5 miliar tersebut untuk pengadaan pipa berukuran 2-6 inci dan biaya pemasangan.

Dikatakan Arsana, anggaran tersebut digelontor dari penyertaan modal pemerintah (PMP) Kota Denpasar untuk pelaksanaan tahun 2018 ini. "Anggaran itu dikeluarkan dari PMP yang digunakan untuk pengadaan pipa yang berukuran mini sekaligus biaya pemasangan diseluruh Denpasar," ungkapnya.

Sebab, saat ini kata dia, penambahan pipa dilakukan untuk semakin memperbaiki kualitas pipa yang akan disalurkan menuju perumahan warga. Disisi lain stok yang dimiliki PDAM dari IPA Waribang dan Petanu mencapai 300 kubik. Tender pengadaan pipa mini dan pemasangan tersebut akan dilakukan pada bulan Agustus 2018.

Disisi lain kata dia, kendati pasokan yang dimiliki PDAM cukup besar, namun permintaan pendaftar baru pelanggan PDAM malah semakin sedikit. Padahal Arsana mengaku pihaknya sudah rutin melakukan sosialisasi ke pelosok hingga ke desa-desa untuk memberikan pemahaman agar masyarakat bisa mendaftarkan diri sebagai pelanggan PDAM.

"Saat ini kami memiliki pasokan cukup besar. Tetapi minat masyarakat minim untuk melakukan pendaftaran sebagai pelanggan. Padahal kita sudah berupaya melakukan sosialisasi ke tingkat desa," jelasnya.

Lanjut Arsana, selain pengadaan pipa mini, pihaknya juga masih melanjutkan pengajuan untuk pengadaan pipa di Jalan Antasura hingga Jalan Nangka. Umurnya sudah semakin tua bahkan terlalu sering mengalami kebocoran. Untuk saat ini pihaknya kembali melakukan rekapitulasi rancangan anggaran biaya (RAB) pengadaan pipa sebesar Rp 101 miliar untuk anggaran 2019. **m**

Edisi : Senin, 16 Juli 2018

Hal : 3



Bupati Serahkan Dana Hibah Rp 800 Juta

★ Dukong Upacara Atma Wedana dan Manusia Yadnya Desa Adat Padang Luwih

MANGUPURA, NusaBali

Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 800 juta kepada krama Desa Adat Padang Luwih, Desa Dalung, Kamis (12/7) di Jaba Pura Dalem Penataran Banjar Tegaljaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara. Dana tersebut untuk mendukung pelaksanaan Upacara Atma Wedana dan Manusia Yadnya Desa Adat Padang Luwih.

Bantuan diterima secara simbolis oleh Bendesa Adat Padang Luwih I Ketut Oka Sudana.

Acara ini juga dihadiri Gubernur Bali terpilih I Wayan Koster dan Cokorda Artha Ardana Sukawati (Cok Ace), Ketua Gatriwara Kabupaten Badung, Dinas Kebudayaan Badung, Kementerian Agama Badung, Sekcam Kuta Utara, Perbekel Dalung I Gede Putu Arif Wiratya serta tokoh masyarakat setempat.

Bupati Giri Prasta sangat mendukung Upacara Atma Wedana dan Manusia Yadnya yang dilaksanakan krama Desa Adat Padang Luwih, Desa Dalung. Karya ini merupakan bagian dari pelestarian, seni, adat, agama, tradisi dan budaya. Upacara Atma Wedana dan Manusia Yadnya masal ini dapat meringankan dari segi

biaya serta dapat meningkatkan rasa menyama braya dan gotong royong masyarakat.

"Untuk itu kami Pemkab Badung akan selalu hadir di tengah-tengah



• IST
BUPATI Badung I Nyoman Giri Prasta menyerahkan dana hibah sebesar Rp 800 juta kepada krama Desa Adat Padang Luwih, Desa Dalung, Kamis (12/7) di Jaba Pura Dalem Penataran Banjar Tegaljaya, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara.

masyarakat untuk meringankan beban, paling tidak masyarakat tidak lagi mengeluarkan pesonpeson atau iuran berupa dana," jelas Bupati.

Bupati Giri Prasta juga mengatakan, dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, Pemkab Badung telah menetapkan Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana

(PPNSB). PPNSB mencakup lima skala prioritas program pembangunan meliputi; pangan, sandang dan papan, kesehatan dan pendidikan, jaminan sosial dan tenaga kerja, seni, adat, agama, tradisi dan budaya, serta pariwisata termasuk infrastruktur. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat melalui program bedah rumah, pendidikan dan kesehatan gratis, pelayanan administrasi kependudukan gratis, PBB gratis termasuk santunan kematian.

Sementara Bendesa Adat Padang Luwih I Ketut Oka Sudana menyampaikan terima kasih kepada Bupati Badung yang telah membantu pelaksanaan Upacara Atma Wedana dan Manusia Yadnya ini sehingga bisa berjalan dengan lancar. "Kami mewakili masyarakat menyampaikan terima kasih atas bantuan Bapak Bupati Badung, sehingga upacara iri dari awal upacara Ngelungah yang diikuti 49 orang, atur piuning, ngangkid yang diikuti 92 orang anak alit, lanjut metiga bulan, ngadegang manik galih, mesanan epeg, angget don bingin, ngajum sekar, murwa daksina, nunas tirta dan muja prelina ini bisa berjalan lancar," katanya. @ asa

Edisi : Sabtu, 14 Juli 2018

Hal : 2



Badung Bakal Bagikan 6.794 Laptop Gratis

MANGUPURA, NusaBali

Sekali lagi, Dinas Pendidikan, Kepemudahaan, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Badung bakal menggelontorkan laptop gratis kepada siswa di Badung. Tapi kali ini, laptop gratis bakal dibagikan untuk siswa sekolah menengah pertama (SMP), kelas VII. Selain siswa, sejumlah guru juga mendapatkan fasilitas serupa, hanya jumlahnya terbatas.

Laptop gratis yang menurut rencana dibagikan pada tahun pelajaran baru 2018/2019 totalnya mencapai 6.794 unit. Jumlah tersebut di luar jatah yang akan diberikan kepada sejumlah guru. Kepada guru jumlah laptop yang bakal dibagikan sebanyak 37 unit.

"Untuk pengadaan laptopnya sendiri pemerintah sudah menyiapkan anggaran sebesar Rp 61.607.563.800," terang Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Disdikpora Badung I Made Mandi, Jumat (13/7) kemarin.

Namun demikian, pihaknya juga masih menunggu jumlah final siswa yang terdaftar pada

tahun ajaran kali ini. "Tapi sebagian sudah dikirim ke sekolah-sekolah. Untuk di Badung ada 22 SMP negeri," terang Mandi.

Sama seperti perlakuan pada laptop yang dibagikan ke siswa SD, laptop yang dibagikan tidak serta merta menjadi hak milik. Sebab, laptopnya sendiri merupakan belanja modal dan menjadi aset pemerintah daerah. Sementara sekolah hanya hak pinjam pakai. "Jadi siswa SDN hanya menggunakan pada saat kelas V dan VI. Begitu juga untuk SMPN sama, setelah itu digunakan lagi oleh adik kelasnya," kata Mandi.

Mengenai perawatan, tetap sepenuhnya kewenangan di Disdikpora. Namun, Mandi menyatakan pihaknya tak terlalu khawatir, sebab laptop tersebut mendapat garansi selama empat tahun dari rekanan.

Berarti kalau ada laptop rusak pemeliharannya tanggung jawab rekanan? "Iya, kalau ada laptop rusak, pemeliharannya dari rekanan. Alurnya, pihak sekolah membawa laptop yang

bermasalah itu ke Dinas, kemudian rekanan mengambil di dinas untuk diperbaiki. Setelah jadi, pihak sekolah mengambil langsung ke Dinas," tandasnya.

Seperti diketahui, pembagian laptop kepada siswa dan kepada guru merupakan inisiasi dari Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta. Tujuannya, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Gumi Keris. Dengan tersedianya laptop, diharapkan siswa dapat lebih maksimal bekerja. Begitu juga para guru, diharapkan dapat semakin meningkatkan kualitasnya dalam mengajar. Pemberian laptop gratis sendiri telah dimulai pada tahun 2016 lalu.

Selain di bidang pendidikan, mengacu pada lima bidang prioritas dalam Pola Pembangunan Nasional Semesta Berencana (PPNSB), Pemkab Badung memfokuskan program kebijakan pro rakyat diantaranya bidang sandang, pangan dan papan, bidang kesehatan dan, bidang jaminan sosial dan tenaga kerja, bidang seni, adat, agama dan budaya dan bidang pariwisata. **asa**

Edisi : Sabtu, 14 Juli 2018

Hal : 2



Delapan OPD 'Disemprit' BPK

★ Akibat Salah Penempatan Kegiatan Barang dan Jasa

Pos kegiatan belanja barang dan jasa ditempatkan sebagai Belanja Langsung (BL). Selain itu realisasi program kegiatan di sejumlah OPD, masih di bawah 50 persen.

SINGARAJA, NusaBali

Meski Pemkab Buleleng meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

DELAPAN OPD YANG MENDAPAT PERINGATAN DARI BPK RI

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
- Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan (KBPP)
- Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimta)
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans)
- Bagian Umum Setkab Buleleng
- Badan Perizinan, Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (BPPMST)
- Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Dagprin)
- Dinas Perikanan

RI, tetap memberi catatan atas laporan hasil pemeriksaan (LHP) APBD 2017. Sebanyak delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), diperingatkan agar memperbaiki penempatan pos kegiatan barang dan jasa.

Sebanyak delapan OPD ini diketahui ada kekeliruan penempatan pos kegiatan belanja barang dan jasa, yang semestinya menjadi Belanja Tidak Langsung (BTL), justru ditempatkan sebagai Belanja Langsung (BL). Di samping itu, ada realisasi program kegiatan di sejumlah

OPD, masih di bawah 50 persen.

Catatan BPK RI tersebut, telah dibahas Lembaga DPRD Buleleng, Jumat (13/7) siang di Ruang Gabungan Komisi. Rapat dipimpin Ketua DPRD Buleleng, Gede Supriatna dengan menghadirkan tim ahli. Hanya saja dalam rapat tersebut, anggota Dewan yang hadir tidak banyak menyoroti laporan hasil pemeriksaan BPK RI, atas APBD 2017.

Dewan berpandangan, hasil pemeriksaan BPK RI dengan opini WTP menandakan pengelolaan keuangan daerah su-

dah mengikuti aturan dan mekanisme yang ada. "Kita tidak banyak membahas hasil BPK RI, apalagi sudah mendapat opini WTP. Paling nanti kita sifatnya hanya konfirmasi terhadap eksekutif apakah catatan BPK RI itu sudah ditindaklanjuti," kata Ketua Dewan, Gede Supriatna usai pembahasan.

Supriatna mengungkapkan, yang menjadi fokus pembahasan adalah Ranperda Pelaksanaan APBD 2017, karena ada beberapa temuan dimana masih ada sejumlah OPD yang realisasi program kerjanya di bawah 50 persen. Pihaknya pun membuat jadwal khusus terkait dengan pembahasan program kinerja tersebut dengan pihak eksekutif. "Kita sudah buat kreterianya, ada beberapa OPD, ini yang perlu kita bahas lebih lanjut," tegasnya. **k19**

Edisi : sabtu, 14 Juli 2018

Hal : 4

Anggaran Perbaikan Drainase Rp 10 Miliar

BANGLI, NusaBali

Perbaikan drainase di Bangli sisakan pekerjaan sekitar 700 meter lebih. Kelanjutan perbaikan saluran drainase ini direncanakan pada tahun 2019 mendatang. Estimasi biaya yang dihabiskan sekitar Rp 10 miliar. Perbaikan direncanakan tahun 2019 karena terjadi keterlambatan pekerjaan di tahun 2018.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Bangli, I Made Soma, mengatakan perbaikan saluran drainase kota Bangli pada tahun lalu menasar drainase di sebelah barat jalan dari sebelah

timur RSUD lama hingga sebelah utara SPBU. Sementara untuk sebelah timur jalan baru dikerjakan dari sebelah timur RSUD lama sampai depan kantor Kejari Bangli. Kegiatan itu menghabiskan anggaran Rp 7,6 miliar dari pagu anggaran Rp 11 Miliar. "Belum tuntas pengerjaannya, kami tidak menampik banjir di Bangli belum terselesaikan," ungkap Soma, Jumat (13/7).

Sebelumnya banjir kerap terjadi di depan SMAN I Bangli, kini berpindah di depan SPBU Bangli. Kelanjutan perbaikan saluran drainase sebelah barat akan dimulai dari depan

SPBU sampai patung Adipura. Sedangkan saluran drainase sebelah timur akan dimulai dari depan kantor Kejaksaan sampai patung Adipura. Made Soma menyebutkan, sejatinya kelanjutan perbaikan saluran drainase direncanakan tahun 2018 menggunakan dana dari APBD Induk.

Namun karena terjadinya keterlambatan pengerjaan, perbaikan saluran drainase tahun 2017 hingga pembayaran sisa pekerjaan dialokasikan di APBD Perubahan 2018. "Pengerjaan melewati tahun anggaran. Sekitar Rp 3 miliar

belum terbayarkan. Kemungkinan kelanjutan pengerjaan rehabilitasi saluran drainase akan dilaksanakan tahun 2019," bebernya.

Sementara gorong-gorong di sebelah utara SPBU Bangli yang dikerjakan saat rehabilitasi saluran drainase mulai rusak. Made Soma akan turun mengecek kondisi gorong-gorong tersebut. "Kami segera mengecek mudah-mudahan penurunan terjadi di atas plat beton, jika penurunan terjadi di bawah plat maka harus dilakukan pembongkaran. Jelas perlu biaya lagi," imbuhnya. 

Edisi : Sabtu, 14 Juli 2018

Hal : 8